



Ingin Disamakan dengan Becak dan Andong di Malioboro

Saat "Pilot" Betor Memprotes Kebijakan Wakil Rakyat di DPRD Kota Jogja



TETAP NGEKSIS:
Sebagian awak betor menunggu hasil rapat dengan pendapat raperda transportasi tradisional di depan kantor DPRD Kota Jogja kemarin (27/3).

Awan mendung di atas langit Jogja mengiringi galaunya ratusan pengemudi becak motor (betor). Kemarin (27/3) mereka menggeruduk kantor DPRD Kota Jogja. Ada apa gerangan?

HERU PRATOMO, Jogja

SEBAGAI pengemudi kendaraan transportasi umum para pengemudi betor merasa ingin di-*uwong-ke*, sebagaimana sopir taksi, bus kota, dan angkutan penumpang lainnya. Perasaan itu sirna saat mereka tidak diundang dan dilibatkan dalam rapat dengar penda-

pat umum (RDPU) panitia khusus (pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Trans-

portasi Lokal. Itulah alasan mereka menduduki kantor wakil rakyat. Mereka mempertanyakan alasan

Pansus tidak mengundang pengemudi betor. "Sebagai rakyat kecil kenapa kami tidak diundang?"

tanya Bambang Sugiharto, salah seorang pengemudi betor kepada Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Ririk Banowati.

Selama ini Bambang merasa telah menaati peraturan yang ada. Hal itulah yang mendorongnya ikut memprotes sikap pansus.

Herman, "pilot" betor lain, yang sudah puluhan tahun menjalani profesi sebagai pengayuh becak, kini tak lagi mampu mengandalkan otot kakinya. Kini, di usianya yang merangkak 64 tahun Herman tak mampu lagi mengayuh pedal becak. Karena itulah dia ikut-ikutan memodifikasi becaknya dengan menambah mesin bermotor. Jadilah betor. "Kulo mbecak pun kawit 1970-an," katanya.

► Baca Ingin... Hal 7

Berharap Betor Masuk Regulasi Transportasi Tradisional

■ INGIN...

Sambungan dari hal 1

Saat muda, Herman mampu menarik becak tiga kali dalam sehari. Dengan upah Rp 15 ribu per sekali tarik dari depan Hotel Inna Garuda sampai Pasar Beringharjo. Menggunakan betor, meski hanya Rp 10 ribu sekali tarik dengan jarak yang sama, dia bisa bolak-balik 10 kali. Artinya, hasil yang bisa dibawa pulang jauh lebih baik dibanding saat *ngonthel* becak dengan tenaga kaki.

Tampak hadir bersama pengemudi betor, di antaranya Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY) Parmin, Ketua

Paguyuban Pengemudi Becak Kayuh Yogyakarta (PPBKY) Jumono, serta Pelindung PBMY dan PPBKY Brotoseno.

Ketiga tokoh itu meyakinkan bahwa pengemudi betor layak ikut diperhatikan. Apalagi, saat ini banyak warga Jogja yang mengandalkan hidup dari betor. Di sisi lain, selama ini tak pernah muncul masalah antara pengemudi betor dan becak kayuh. "Tidak ada masalah. Tidak berkonflik. Semua rukun," klaim Brotoseno di hadapan pimpinan dewan.

Warga Jogja mengenal Brotoseno lebih sebagai komandan SAR DIJ. Sikap blak-blakan menjadi salah satu ciri khasnya. De-

mikian pula yang ditunjukkan saat mengikuti RDPU. Brotoseno menyebut, saat ini ada sekitar lima ribu becak kayuh dan 1.500 betor di DIJ.

"Jika betor dilarang, angkutan lain tak berizin seharusnya juga tidak boleh. Termasuk angkutan *online* karena belum ada aturannya," lanjutnya.

Keberadaan betor juga makin menyita perhatian aparat. Sebagaimana diketahui, pihak kepolisian mulai mengeluarkan SIM D, yang dimaknai sebagai legalitas pengendaraan kendaraan roda tiga. Termasuk betor.

Kegagalan para pengemudi betor kian benderang ketika Ketua Pansus Bambang Seno

Baskoro menjawab pertanyaan seputar draf raperda. Bambang tak menampik, betor tak dimasukkan dalam kategori kendaraan tradisional. Namun hanya becak kayuh dan andong.

Asa para "nakhoda" becak belum terjawab. Sebab, materi raperda hanya menasar dua alat transportasi bertenaga makhluk hidup itu. Terutama mengenai zona operasinya, yang diti-tikberatkan di kawasan cagar budaya. Misalnya, Malioboro, Keraton Jogja, Pakualaman, Kotagede, dan Kotabaru. Nanti-nya, di seluruh kawasan itu akan dibuatkan parkir khusus becak kayuh dan andong. Tidak ada betor. (yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005